

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa. Menyadari akan hal ini, pemerintah melakukan perubahan dan penyempurnaan pengelolaan pendidikan yang salah satunya dikenal dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat (2002:45) mengisyaratkan bahwa implementasi MBS akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sifatnya internal di lingkungan sekolah, ataupun faktor eksternal di luar sekolah, yaitu: (1) kepemimpinan dan manajemen sekolah yang baik, (2) kondisi sosial, ekonomi, dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan, (3) dukungan pemerintah, dan (4) profesionalisme.

Selanjutnya, Rivai (2009:148) mengemukakan:

Dalam mengimplementasikan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya berkaitan dengan permasalahan administrasi, keuangan dan fungsi setiap personel sekolah di dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Kepala sekolah harus tampil sebagai motivator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat sekolah dan secara personal harus terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan mutu total dengan menciptakan kompetisi dan penghargaan baik di dalam sekolah itu sendiri maupun dengan sekolah lain.

Dengan demikian, konsep MBS mengharuskan kepala sekolah untuk berperan aktif dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyelaraskan

segala sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepala sekolah harus memiliki visi dan misi kelembagaan serta semangat untuk maju dan mengabdikan dalam mencapai tujuan dan program-program pendidikan yang telah ditetapkan.

Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan MBS adalah partisipasi warga masyarakat melalui wadah Komite Sekolah. Dalam hal ini, Satori dan Fattah (2001:99) menyatakan: "Sekolah perlu memberdayakan masyarakat melalui Komite Sekolah dengan mengajak bekerja sama dalam memanfaatkan potensi yang ada sehingga semua sumber daya berkembang secara maksimal sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Kebersamaan merupakan potensi yang amat vital untuk membangun masyarakat menciptakan demokratisasi pendidikan".

Dengan MBS diharapkan dapat mendorong terciptanya peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan muaranya pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan pada tataran yang paling bawah yaitu sekolah. Oleh sebab itu, penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan yang dapat dianalisis dan dipahami melalui apa yang senyatanya terjadi sesudah program atau kebijakan dirumuskan dan dinyatakan berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja komite sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan demikian, rumusan judul pada penelitian ini adalah: "Kontribusi Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Komite Sekolah terhadap Efektivitas Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Tasikmalaya".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada kontribusi perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja komite sekolah terhadap efektivitas implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian, adanya otonomi pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dan untuk mengimplementasikan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sangat diperlukan figur kepala sekolah yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan kredibilitas serta daya juang yang tinggi sehingga dapat memberdayakan segala sumber daya yang ada, termasuk sumber daya masyarakat yang diorganisasikan dalam wadah komite sekolah. Untuk itu, diperlukan kesamaan persepsi dari seluruh elemen pendidikan yang ada di sekolah tentang pentingnya konsistensi implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Tasikmalaya dalam mengimplementasikan kebijakan MBS ini adalah analisis terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi sehingga kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dapat melahirkan program-program yang realistis dan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kepala sekolah selaku pemimpin dalam lembaga pendidikan (sekolah) hendaknya dapat memacu partisipasi masyarakat melalui wadah komite sekolah.

Atas dasar itu, maka masalah-masalah penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) lingkungan pendidikan pada SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya?

2. Bagaimana persepsi kepala sekolah dan komite sekolah SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya terhadap implementasi MBS?
3. Bagaimana perilaku kepemimpinan kepala sekolah SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya dalam mengimplementasikan MBS?
4. Bagaimana peran komite sekolah SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya dalam mengimplementasikan MBS?
5. Bagaimana persepsi guru SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya terhadap kemampuan manajerial kepala sekolahnya dalam mengimplementasikan MBS?
6. Seberapa besar kontribusi perilaku kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas implementasi MBS pada SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya?
7. Seberapa besar kontribusi kinerja komite sekolah terhadap efektivitas implementasi MBS pada SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya?
8. Seberapa besar pengaruh perilaku kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja komite sekolah pada SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya?
9. Seberapa besar pengaruh kinerja komite sekolah terhadap perilaku kepemimpinan kepala sekolah pada SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya?
10. Seberapa besar kontribusi perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja komite sekolah terhadap efektivitas implementasi MBS pada SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya?

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, perumusan masalah penelitian ini difokuskan pada, "Seberapa besar kontribusi perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja komite sekolah terhadap efektivitas implementasi MBS pada SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya?".

Adapun sub masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi perilaku kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas implementasi MBS pada SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Seberapa besar kontribusi kinerja komite sekolah terhadap efektivitas implementasi MBS pada SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya kontribusi perilaku kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas implementasi MBS pada SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Mengetahui besarnya kontribusi kinerja komite sekolah terhadap efektivitas implementasi MBS pada SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Mengetahui besarnya kontribusi perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja komite sekolah secara simultan terhadap efektivitas implementasi MBS pada SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan wawasan tentang ilmu administrasi pendidikan baik pada tingkat makro di lembaga birokrasi pendidikan, maupun pada tingkat mikro di tingkat satuan pendidikan (sekolah).

Khususnya pada tingkat sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan model-model baru kerjasama antara kepala sekolah dengan komite sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan MBS sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi masukan kepada pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, agar dapat memberdayakan masyarakat melalui wadah komite sekolah.
- b. Memberi masukan kepada kepala sekolah dan komite sekolah dalam bekerja sama meningkatkan mutu pendidikan melalui pengimplementasian kebijakan MBS dengan menggalang dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap program-program sekolah.
- c. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, yang bertanggungjawab dalam memajukan lembaga pendidikan di wilayahnya dengan melibatkan peranserta masyarakat. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dan evaluasi terhadap pemberlakuan kebijakan

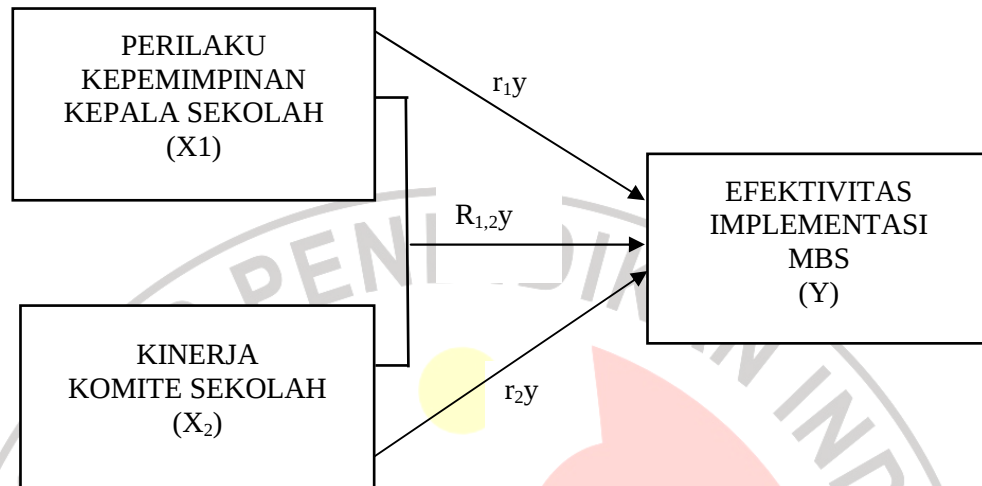
MBS dan komite sekolah, sehingga dapat diambil langkah-langkah antisipatif dan mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang timbul dari kebijakan tersebut sehingga Manajemen Berbasis Sekolah dan Komite Sekolah dapat berfungsi secara efektif.

F. Asumsi Dasar

Penelitian ini didasarkan pada beberapa asumsi, sebagai berikut:

1. Efektivitas implementasi MBS dipengaruhi oleh perilaku kepemimpinan kepala sekolah dalam melaksanakan fungsinya sebagai manajer. Fattah (2003:15) mengemukakan bahwa dalam implementasi MBS, kepala sekolah sebagai manajer pendidikan, dituntut untuk bertanggungjawab atas seluruh komponen sekolah, dan harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan mutu hasil belajar yang berorientasi kepada pemakai, baik internal (siswa) maupun eksternal (masyarakat, pemerintah, lembaga industri dan dunia kerja).
2. Efektivitas implementasi MBS dipengaruhi oleh kinerja komite sekolah yang mewadahi partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam konteks MBS merupakan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam pengambilan keputusan, melaksanakan keputusan, dan mengevaluasinya secara proporsional yang dilandasi kesepakatan. Fattah (2003:16) mengemukakan bahwa MBS akan efektif diterapkan jika para pengelola pendidikan mampu melibatkan *stakeholder* terutama peningkatan peran serta masyarakat dalam menentukan kewenangan, pengadministrasian dan inovasi kurikulum yang dilakukan oleh masing-masing sekolah.

Dengan demikian, asumsi dasar penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Kerangka Berfikir Penelitian

G. Hipotesis

Hipotesis atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kontribusi yang signifikan dari perilaku kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas implementasi MBS pada SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Terdapat kontribusi yang signifikan dari kinerja komite sekolah terhadap efektivitas implementasi MBS pada SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Terdapat kontribusi yang signifikan dari perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja komite sekolah secara simultan terhadap efektivitas implementasi MBS pada SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya.

H. Definisi Operasional

1. Perilaku kepemimpinan adalah semua kegiatan atau aktivitas pemimpin dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi kepemimpinan yang berpengaruh dan menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Ada dua dimensi perilaku kepemimpinan, yaitu: (1) berorientasi pada organisasi (*concern for organization*), dan (2) berorientasi pada hubungan individual (*concern for individual relationship*). Dengan demikian, yang dimaksud dengan perilaku kepemimpinan kepala sekolah dalam penelitian ini, adalah: (1) perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, yaitu: melakukan komunikasi satu arah, menyusun rencana kerja, merancang tugas-tugas, menetapkan prosedur kerja, dan menekankan pencapaian tujuan organisasi; dan (2) perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan manusia, yaitu: menjalin hubungan yang akrab, menghargai anggota, bersikap hangat, dan menaruh kepercayaan kepada anggota.

2. Kinerja adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah sumber kerja yang dipergunakan. Kinerja dikatakan rendah apabila hasil yang diperoleh lebih kecil dari sumber kerja yang dipergunakan. Kinerja memiliki lima dimensi, yaitu: (1) kualitas kerja, (2) tepat waktu, (3) inisiatif, (4) kemampuan, dan (5) komunikasi (Terry, 1998:43).

3. Komite Sekolah adalah suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan (sekolah).

Peran dan fungsi komite sekolah adalah: (1) sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), (2) sebagai pendukung (*supporting*

agency), (3) sebagai pengontrol (*controlling agency*), dan (4) sebagai mediator (*mediator agency*).

4. Kinerja komite sekolah adalah proses dan hasil kerja yang dicapai oleh komite sekolah dalam melaksanakan peran dan fungsinya untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan pendidikan di sekolah.
5. Efektivitas adalah semua usaha dan tindakan yang dapat membawa hasil. Suatu sekolah akan disebut efektif jika terdapat hubungan yang kuat antara apa yang telah dirumuskan untuk dikerjakan dengan hasil-hasil yang dicapai oleh sekolah, sebaliknya sekolah dikatakan tidak efektif bila hubungan tersebut rendah (Getzel, 1969).
6. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model pengelolaan pendidikan dengan pemberian otonomi yang luas kepada sekolah untuk merencanakan, mengambil keputusan, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
7. Efektivitas implementasi MBS adalah usaha atau tindakan yang dilakukan oleh pengelola sekolah dalam melaksanakan rumusan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

I. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Surakhmad (1998:140) mengemukakan bahwa metode deskriptif merupakan metode yang ditujukan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang. Ciri-ciri metode deskriptif adalah: (1) memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang (pada masalah-

masalah aktual), dan (2) data yang dikumpulkan mula-mula diteliti, dijelaskan, dan kemudian dianalisis. Oleh karena itu, metode ini disebut metode analisis.

Untuk melengkapi data, digunakan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen tertulis yang ada hubungannya dengan masalah implementasi MBS. Jenis informasi yang ditelusuri diantaranya terkait dengan kebijakan pemerintah daerah pasca diberlakukannya MBS.

J. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan guru SMK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 165 orang. Menggunakan guru sebagai sumber data karena mereka terlibat langsung dalam pengelolaan pendidikan di sekolah.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi yang diambil untuk dijadikan sumber data dan dianggap mewakili keseluruhan populasi secara representatif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *probability sampling* karena memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, dan cara pengambilan sampling dilakukan dengan cara *simple random sampling*. Dikatakan sederhana (simple) karena cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam golongan populasi tersebut dan dilakukan karena anggota populasinya homogen.